



BUPATI GROBOGAN



WAKIL BUPATI GROBOGAN

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara warga masyarakat Grobogan yang saya hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007. Penyusunan ILPPD ini merupakan perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2007 kepada masyarakat.

Penyampaian ILPPD ini, disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai materi, format dan sistematika ILPPD, berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 dan Surat MENDAGRI tanggal 8 Mei 2007 Nomor 188.32.04/558-DV perihal PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Muatan ILPPD berisi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi :

1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
2. Penyelenggaraan tugas pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat,

pada pasal 27 ayat (3) bahwa muatan ILPPD merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan berdasarkan pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa LPPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya pokok-pokok materi ILPPD adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di antara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS, yang kondisi tanahnya sebagian berupa daerah pengunungan kapur dan perbukitan serta dibagian tengahnya berupa dataran. Kabupaten Grobogan terletak diantara 2 (dua) pegunungan Kendengan Utara dan Selatan, yang berbatasan dengan sebelah Barat Kabupaten Semarang, dan Demak, sebelah Utara dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, sebelah Timur dengan Kabupaten Blora dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Boyolali, Sragen, Semarang dan Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Mempunyai luas wilayah 1.975,86 km² atau 197.586,420 Ha, jumlah penduduk pada Tahun 2007 sebanyak 1.385.817 jiwa, terdiri 685.906 jiwa (49,49%) laki-laki dan 699.911 (50,51%) perempuan dengan kepadatan penduduk 701 jiwa/km², dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,54%.

Secara administrasi, Kabupaten Grobogan terbagi dalam 19 Kecamatan, 280 Desa/Kelurahan dan 1.451 Dusun, dengan potensi unggulan daerah berupa Padi, Jagung, Buah Melon, Industri Genteng Press, Batu Kapur dan Furniture.

Perkembangan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, dapat di ketahui dari perkembangan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan dan perkembangan ekonomi. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pendidikan, salah satu indikatornya dapat dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Berdasarkan indikator APM dan APK Tahun 2007 menunjukkan, partisipasi pendidikan masyarakat cenderung meningkat, khususnya untuk tingkat pendidikan dasar 9 tahun (Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun).

APK SD/MI Tahun 2007 mencapai 102,78% meningkat sebesar 0,74% dibanding Tahun 2006 yang sebesar 102,04%, APK SMP/MTs Tahun 2007 mencapai 91,98% meningkat sebesar 3,32% dibanding Tahun 2006 yang sebesar 88,66%. Sedangkan APK SMA/MA/SMK pada Tahun 2007 sebesar 35,34% yang angkanya sama dengan Tahun 2006 sebesar 35,34.

APM SD/MI Tahun 2007 mencapai 99,27% meningkat sebesar 4,66% dibanding Tahun 2006 yang sebesar 94,61%. APM SMP/MTs Tahun 2007 mencapai 81,00% menurun

sebesar 0,5% dibanding Tahun 2006 yang sebesar 81,50%. Sedangkan APM SMA/MA/SMK Tahun 2007 tidak berubah / masih sama dengan Tahun 2006 yang sebesar 25,41%

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKBAL) dan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

AKB, yang menunjukkan banyaknya kematian bayi umur kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup, pada Tahun 2007 tercatat sebesar 12,75 per 1000 kelahiran hidup, mengalami kenaikan dibanding Tahun 2006 sebesar 8,79 per 1000 kelahiran hidup.

AKI, yang menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, pada Tahun 2007 tercatat sebesar 147,11 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2006 sebesar 141,43 per 100.000 kelahiran hidup. AKBAL, yang merupakan gambaran permasalahan kesehatan balita, pada Tahun 2007 tercatat sebesar 0,67 per 1.000 kelahiran hidup, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2006 sebesar 0,65 per 1000 kelahiran hidup. Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), yang merupakan gambaran tingkat kesehatan atau kualitas gizi bayi selama dalam kandungan sampai dengan kelahiran, pada Tahun 2007 tercatat sebesar 345 kejadian, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2006 sebesar 129 kejadian.

Adanya peningkatan indikator pada AKB, AKI, AKBAL dan BBLR tersebut disebabkan masih kuatnya pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan pada penanganan persalinan maupun rujukan ibu hamil ke rumah sakit.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2007, PDRB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 5,55% lebih besar dibandingkan Tahun 2006 dengan pertumbuhan 4,00%. Adapun Jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, adalah sektor pertanian yang mencapai sebesar 6,47% sedangkan pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,4%.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB juga diikuti dengan kenaikan PDRB perkapita dimana perkembangan PDRB perkapita menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB perkapita atas dasar harga konstan Tahun 2007 sebesar Rp. 2.043.111,70 dibanding Tahun 2006 yang sebesar Rp. 1.946.128,16 yang berarti mengalami kenaikan 4,98%. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2007 sebesar Rp 3.355.555,73 mengalami kenaikan sebesar 15,06% dibanding Tahun 2006 sebesar Rp. 2.916.391,13.

Distribusi pendapatan masyarakat pada Tahun 2007 menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau pada kategori tidak timpang (low inequality). Hal itu ditunjukkan dari Indeks Gini Ratio yang berdasarkan criteria Bank Dunia kondisinya masih di bawah angka 0,35 yakni sebesar 0,229; dan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah menikmati bagian pendapatan sebesar 27,29%, jauh di atas batas ketimpangan yaitu sebesar 17%.

C. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk penyusunan teknisnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan dengan prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Berimbang dan Dinamis, Disiplin, serta Transparansi, dan Akuntabilitas. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, dan untuk perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.

APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, terdiri sebagai berikut :

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan sebagian besar masih bersumber dari penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan. Sementara penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah relatif masih kecil yaitu dibawah 10%.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ditempuh dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Melalui kedua hal tersebut, diharapkan Pendapatan Asli Daerah meningkat, dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai potensi yang ada.

Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan :

- a. Pendataan pembaharuan wajib pajak, yang bertujuan para wajib pajak akan terjaring untuk dapat memenuhi kewajibannya;
- b. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
- c. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah.

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendapatan/obyek pendapatan baru, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menjadi beban masyarakat, serta tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat secara riil.

b) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp. 748.626.477.877,- atau 102,34%, dari target pendapatan sebesar Rp. 731.481.621.313,-. Proporsi terbesar Pendapatan Daerah, berasal dari Dana Perimbangan yang sebesar 84,32% dari total Pendapatan Daerah. Lain-lain Pendapatan Yang Sah memberikan kontribusi

sebesar 8,79%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 baru memberikan kontribusi sebesar 6,89% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi masih cukup tinggi.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 0,33% dibandingkan dengan Tahun 2006 yang hanya 6,56%. Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007, sebagaimana berikut :

Tabel I
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan TA. 2007

No	PENDAPATAN DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	47.359.543.857	51.556.443.003
1	Pajak Daerah	8.767.000.000	9.431.471.476
2	Retribusi Daerah	27.063.668.515	28.120.719.413
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.397.493.800	2.345.162.147
4	Lain-lain PAD Yang Sah	9.131.381.542	11.659.089.967
B.	DANA PERIMBANGAN	617.019.036.896	631.278.448.911
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	42.995.036.896	57.208.701.711
2	DAU	563.699.000.000	563.744.747.200
3	DAK	10.325.000.000	10.325.000.000
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	67.103.040.560	65.791.585.963
1	Hibah	10.000.000.000	10.000.000.000
2	Dana Darurat	0	0
3	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.564.293.000	25.652.738.403
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.000.000.000	10.000.000.000
5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	20.538.747.560	20.138.847.560
	JUMLAH (A+B+C)	731.481.621.313	748.626.477.877

Sumber : *Dipenda Kab. Grobogan Th. 2007 (belum diaudit BPK)*

2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran APBD TA. 2007 diterapkan prinsip kebijakan anggaran terdiri dari :

a. Kedilan Anggaran;

Anggaran dialokasikan secara adil, disesuaikan dengan tingkat besar dan luasnya serta kemendesakan permasalahan yang dihadapi.

- b. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran;
Pemanfaatan anggaran dimanfaatkan secara tidak boros, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
- c. Anggaran Berimbang dan Dinamis;
Meskipun secara aturan memungkinkan untuk terjadinya defisit anggaran, namun agar tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka belanja daerah diupayakan seimbang dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.
- d. Disiplin Anggaran;
Anggaran yang disediakan dibelanjakan sesuai dengan rencana kegiatan serta ketersediaan anggaran dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Kegiatan yang memanfaatkan anggaran APBD diupayakan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Kebijakan Umum Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007, diarahkan pada :

- a. Identifikasi, analisis dan penyusunan anggaran belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyusunan anggaran belanja daerah memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap capaian sasaran maupun targetnya, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penyusunan anggaran belanja daerah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, dan tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Penyusunan anggaran belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan.

Dalam Belanja Daerah, secara teknis dikelompokkan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri :

- 1. **Kebijakan Teknis Anggaran Belanja Tidak Langsung, terdiri sebagai berikut :**
 - a. Belanja pegawai untuk gaji PNS direncanakan sesuai dengan kebutuhan, ditambah dengan pembayaran tunjangan beras yang mengalami kenaikan

- pada tahun 2005, 2006 serta *accres* kurang lebih 15% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji PNS.
- b. Belanja pegawai di luar belanja gaji, direncanakan untuk anggaran tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja/tempat bertugas/kondisi kerja/kelangkaan profesi/prestasi kerja, maupun pemberian tunjangan kesejahteraan khusus, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing SKPD.
 - c. Belanja bunga dipergunakan untuk membayar kewajiban membayar bunga ADB-LOAN yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Pemerintah Pusat.
 - d. Belanja subsidi tidak direncanakan anggarannya.
 - e. Belanja bantuan social direncanakan untuk bantuan sosial kemasyarakatan berdasarkan fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendapatan, fungsi perlindungan social, fungsi kepemudaan dan olahraga, fungsi pertahanan serta fungsi komunikasi dan koordinasi.
 - f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa direncanakan hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
 - g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa direncanakan hanya untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, yang termasuk di dalamnya untuk dana alokasi desa/kelurahan.
 - h. Belanja tidak terduga dipergunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama satu bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
2. **Kebijakan Teknis Anggaran Belanja Langsung dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan :**
- a. **Belanja Langsung Non Urusan terkait dengan penyelenggaraan program dan kegiatan yang berhubungan :**
 - 1) Pelayanan administrasi perkantoran;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - 3) Peningkatan disiplin aparatur;
 - 4) Fasilitas pindah/purna tugas PNS

- 5) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - 6) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- b. Belanja Langsung Urusan terkait dengan penyelenggaraan urusan desentralisasi yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan.**
- 1) Urusan wajib meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olah Raga, Penanaman Modal, Koperasi UKM, Kependudukan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, dan Perpustakaan.
 - 2) Urusan pilihan meliputi : Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan, Perindustrian dan Ketransmigrasian.

Kebijakan Teknis Belanja Langsung Non Urusan dan Belanja Langsung Urusan sebagai berikut :

- a. Belanja langsung non urusan, pada penjabaran APBD dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang /jasa dan belanja modal aparatur.
 - 1) Belanja pegawai dipergunakan untuk penyediaan anggaran honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS. Khusus untuk belanja honorarium PNS, pada APBD tahun anggaran 2007 upah tenaga honorer dinaikkan sebesar 15%.
 - 2) Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sarana alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja perjalanan pindah tugas dan belanja pemulangan pegawai.

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sesuai dengan kinerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

- a. Belanja langsung urusan, anggaran belanjanya diarahkan pada :
- 1) Percepatan pembangunan infrastruktur;
 - 2) Penanggulangan kemiskinan;
 - 3) Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor;
 - 4) Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan pedesaan;
 - 5) Peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesenian;
 - 6) Pemantapan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan;
 - 7) Mitigasi dan penanggulangan bencana.

3. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Adapun target dan realisasi belanja APBD tahun 2007 terlihat sebagai berikut :

Tabel II
TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH
APBD KABUPATEN GROBOGAN TA. 2007

No	BELANJA DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	429.347.227.857	402.307.072.044
1	Belanja Pegawai	378.026.615.449	354.523.252.161
2	Belanja Bunga	266.000.000	82.516.036
3	Belanja Subsidi	0	0
4	Belanja Hibah	400.000.000	400.000.000
5	Belanja Bantuan Sosial	27.997.673.000	25.379.534.855
6	Belanja Bagi Hasil	800.000.000	799.956.100
7	Belanja Bantuan Keuangan	20.819.939.408	20.678.731.867
8	Belanja Tidak Terduga	1.037.000.000	443.081.025
B.	BELANJA LANGSUNG	358.238.210.560	321.156.401.769
1	Belanja Langsung Urusan	173.093.234.123	158.413.491.827
2	Belanja Langsung Non Urusan	185.144.976.437	162.742.909.942
	JUMLAH (A+B)	787.585.438.417	723.463.473.813

Sumber : BPKD Kab. Grobogan Tahun 2007 (belum diaudit BPK)

Berdasarkan Tabel II, serapan atau realisasi belanja mencapai Rp. 723.463.473.813,- atau 91,86% dari total anggaran sebesar Rp. 787.585.438.417,- yang berarti terdapat sisa lebih sebesar Rp. 64.121.964.604,-

Serapan belanja tidak langsung mencapai Rp. 402.307.072.044,- atau 51,08% dari total anggaran yang sebesar Rp. 787.585.438.417,-. Lebih besar 10,30% apabila dibandingkan dengan serapan belanja langsung yang mencapai

Rp. 321.156.401.769,- atau 40,78% dari total anggaran sebesar Rp. 787.585.438.417,-.

Serapan belanja langsung urusan mencapai 28,92% dari total anggaran sebesar Rp. 787.585.438.417,- lebih besar 17,07% terhadap serapan belanja langsung non urusan yang mencapai 11,85% dari total anggaran sebesar Rp. 787.585.438.417,-. Realisasi belanja tidak langsung sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai mencapai Rp. 354.523.252.161,- atau 45,01% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 787.585.438.417,-. Belanja pegawai ini merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyerapan belanja langsung yang hanya sebesar 89,65% disebabkan karena tertundanya pembayaran biaya pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang masa pemeliharaan yang melebihi akhir Tahun Anggaran 2007, dan dibayarkan pada Tahun 2008. Disamping itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan gagal dalam proses lelang, tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, atau secara teknis tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut, sebagian besar diluncurkan pada APBD Tahun Anggaran 2008.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Hakekat dari pembangunan adalah terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bathin, beriman dan bertaqwa, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempunyai daya saing.

Selanjutnya agar pembangunan yang dilakukan tersebut berhasil dan berdaya guna, perlu perencanaan yang matang, terarah, terkonsep dan didukung dengan data aktual, yang teruji. Disamping itu agar pembangunan dapat lebih fokus, maka terlebih dahulu ditetapkan sasaran yang akan dicapai.

A. VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Grobogan adalah "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan Madani (masyarakat yang berbudaya) dalam tata kehidupan yang demokratis, mandiri, kreatif dan produktif dilandasi oleh akhlak mulia dan menjunjung tinggi supremasi hukum, tertumpu pada keunggulan hasil industri kecil, pertanian dan pariwisata, dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 "

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 13 misi yang kemudian dijabarkan dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007. Adapun 13 misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun meningkatkan pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri kecil (UKM/IKM) guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, melalui penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah dan cepat guna mendukung peningkatan investasi dan penanaman modal.
3. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
4. Meningkatkan peran koperasi, agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian daerah, regional dan nasional
5. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga, utamanya prasarana fisik jalan, jembatan dan irigasi.
7. Menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
8. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita.
9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
10. Mengenali dan memberdayakan potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat.
11. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Grobogan.
12. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
13. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah yang telah ditetapkan tersebut, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok (grand strategi) yang terdiri :

1. **Penataan kembali manajemen pemerintahan daerah yang dinamis**, Dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, dikembangkan sistem peningkatan kapasitas aparatur dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Strategi pertama ini merupakan penjabaran dari misi-misi berikut :
 - a. Menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
 - b. Pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
 - c. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban.

- d. Pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan pemukiman.
- e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan alam, tanah dan air.
- f. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih, sehat, mantap, indah dan berkelanjutan.

2. **Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan**, di segala bidang yang merupakan perwujudan amanat yang tertera di dalam UUD 1945 terutama pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan daerah yang kokoh.

Pemenuhan hak dasar rakyat meliputi : hak memperoleh kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, rasa aman dan kesempatan kerja.

Strategi yang kedua merupakan penjabaran dari visi-misi berikut :

- a. Peningkatan produksi.
- b. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.
- c. Peningkatan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
- d. Peningkatan peran koperasi.
- e. Pelestarian kualitas sumber daya alam.
- f. Peningkatan sarana prasarana.
- g. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
- h. Peningkatan PAD.
- i. Pengembangan dunia pendidikan.
- j. Pengembangan sistem informasi sesuai dengan perkembangan.

Dua *grand strategi* di atas kemudian dijabarkan menjadi strategi-strategi khusus pembangunan, sebagai berikut :

1. Grand strategi yang pertama, yakni "**Penataan kembali manajemen Pemerintah Daerah**" di jabarkan menjadi strategi-strategi khusus pembangunan terdiri :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, agar kinerjanya dapat profesional, jujur, mampu memimpin dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan memberikan perhatian serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjamin agar program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang paling diperlukan masyarakat.
2. Grand strategi yang kedua, yakni "**Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan**" dijabarkan ke dalam strategi-strategi khusus terdiri :

- a. Peningkatan pembangunan perekonomian daerah melalui peningkatan produk unggulan, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan daya saing, pengembangan jaring distribusi pemasaran produk unggulan daerah.
- b. Mengoptimalkan potensi wilayah dengan prioritas : pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.
- c. Peningkatan dunia usaha melalui Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM), dan Pariwisata dengan membuang peluang investasi untuk sektor industri menengah/sektor pertambangan.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan biaya yang terjangkau.
- e. Menggali berbagai potensi sumber pendanaan untuk membiayai program pembangunan di Kabupaten Grobogan terutama infrastruktur jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana perdagangan, pendidikan dan kesehatan.
- f. Pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan pertanian hutan produksi, perkebunan dan pertambangan.
- g. Koordinasi dan kerjasama antar kabupaten di sekitar Kabupaten Grobogan dalam penyusunan RTRW.
- h. Pengembangan wilayah perbatasan dan pembangunan pusat desa pertumbuhan. Strategi yang ditonjolkan mengembangkan dan mengendalikan kawasan strategis.

C. PRIORITAS DAERAH

Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka tidaklah mungkin seluruh bidang/fungsi diberi porsi anggaran dan perhatian yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya skala prioritas, yang disusun berdasarkan permasalahan, situasi dan kondisi masyarakat. Prioritas pembangunan tahun 2007 diarahkan untuk :

1. **Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial ekonomi masyarakat**, khususnya jalan dan jembatan.
2. **Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebagai sumber daya pembangunan masa depan**, khususnya dalam rangka mencegah semakin membesarnya jumlah siswa yang putus sekolah, merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan tenaga kependidikan.
3. **Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas kerja**, melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan sumberdaya manusia tenaga kesehatan.
4. **Menumbuhkan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat**, melalui pembangunan pertanian, perkebunan, pengairan, peternakan, industri dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta pariwisata.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Dalam penyelenggaraan Urusan Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2007 telah menyelenggarakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib yang dilaksanakan terdiri 26 Urusan dan untuk Urusan pilihan terdiri 8 Urusan, dialokasikan anggaran Rp. 358.238.210.560,- terserap Rp. 321.156.401.769,- (89,65%) terdiri :

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dialokasikan anggaran Rp. 43.085.018.560,- terserap Rp. 37.988.916.824,- (88,17%), diarahkan pada upaya mendukung keberhasilan program Pemerintah, yaitu tercapainya Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Pengembangan Gedung TK/RA.
2. Terlaksananya Pembangunan 6 unit gedung SD, rehab ringan, sedang dan berat gedung SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, tambah lokal SMP/MTs dan SMA/SMK, pembangunan Ruang Laboratorium dan Perpustakaan untuk SMA/SMK.
3. Terlaksananya Pengadaan Mebelair untuk (SD/MI), alat-alat Laboratorium, IPA, Bahasa, Komputer, Perpustakaan dan Perbengkelan untuk SMA/SMK, buku penunjang pelajaran dan buku pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi SMA/SMK.
4. Terselenggaranya kelas jauh SMK dan pendidikan luar sekolah, pengelolaan sekolah filial, sekolah satu atap dan PKPS-BBM, Pemberian Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu dan penyetaraan tenaga kependidikan, Penunjang sekolah bertaraf internasional (SBI), PSDM tenaga didik dan anak didik, PORSENI SD dan UAN serta Seleksi calon Kepala Sekolah.
5. Terselenggaranya Pelatihan Tutor Pendidikan Non Formal, Ustad Madin dan TPQ, Pengurus madin, TPQ, Ponpes dan Masjid, Pembinaan Dewan Pendidikan dan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), Pembuatan dan penyaluran kaset Murotal Al Qur'an serta Pendataan lembaga pendidikan keagamaan TPQ, Madin dan PONPES.
6. Terlaksananya Penunjang sarana prasarana pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.
7. Terselenggaranya work shop penerapan kurikulum 2006 satuan pendidikan SD, SMP dan SLA.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2007, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.746.939.730,- terserap Rp. 34.578.205.483,- (94.10%), diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menuju terwujudnya Indonesia Sehat Tahun 2010, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Pengadaan Obat Operasional Puskesmas.
2. Terlaksananya Pembangunan/Rehab Puskesmas Pustu dan Rumdin.
3. Terlaksananya Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pengembangan Laboratorium Puskesmas, Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat, (RB/BP/PKD), dan Peningkatan Fungsi Polindes menjadi PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) serta Revitalisasi Puskesmas menuju ISO 9000, dan Gerakan ASI Eksklusif.

4. Terlaksananya Penanggulangan GAKY, Gizi buruk di RS/Puskesmas, Infeksi Menular Seksual (IMS) HIV AIDS dan AVIAN Influenza (A1) Flu Burung, Pencegahan / Pemberantasan Penyakit menular, Demam Berdarah dan penyakit TB Kusta serta Pemberian Imunisasi.
 5. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan, Kesehatan Keluarga, dan Petugas Puskesmas, Pemantauan dan Pengendalian Program Kesehatan, Penunjang Pasien Miskin.
 6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengembangan Konsep Desa Siaga, dan Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan KLB/Bencana Alam.
 7. Terlaksananya Akreditasi Puskesmas, Peningkatan Ketrampilan di Bidang Teknis Medis, Tenaga Fungsional Bidan, Pengelolaan Sampah Medis dan Tenaga Perawat.
 8. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor, Sarana Puskesmas dan Peralatan Elektromedik.
 9. Tersusunnya Data Statistik Kesehatan, Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan RAPERDA TARIF RSD R. Soejati Purwodadi.
 10. Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kesehatan, , Obat-obatan, Perlengkapan Rumah Tangga, dan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Dr. R. SOEDJATI.
 11. Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Mushola, dan Bangunan Rumah Sakit (Bangsal, halaman dan tempat parkir) RS Dr. R. SOEDJATI dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah, Alat-alat Kesehatan dan Instalasi Air Bersih RS Dr. R. SOEDJATI.
- 3. Urusan Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007, diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan dengan mengembangkan paradigma menuju Kabupaten Grobogan yang bersih dan indah dengan melibatkan partisipasi publik, terwujudnya kualitas kebersihan lingkungan serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup, dialokasikan anggaran Rp 5.374.152.750,- terserap Rp 5.078.833.693,- (94,50%), dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah.
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan dan RTH, Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Ngembak,
3. Terlaksananya Perbaikan TPS Jalan di Kota Purwodadi, Perbaikan Landasan Kontainer Pasar Induk dan Terminal Induk Purwodadi.
4. Terlaksananya Pengadaan Kontainer Sampah, tempat sampah karet, Tanaman Penghijauan serta alat-alat laboratorium lingkungan.

5. Terbangunnya Landasan kontainer Danyang, Tugu batas Kabupaten di Kec. Geyer, Taman Jl A Yani dan Nglejok serta Hutan Desa/Kota.
6. Tertatanya Taman Batas Kota Danyang, Jl Diponegoro, Bundaran Simpang Lima, Purwodadi, Kota Kecamatan Gubug dan Tegowanu, Wirosari dan Tawangharjo.
7. Meningkatnya Sarana Permainan Anak di Taman Bermain Anak.
8. Terpeliharanya Makam Umum di Kabupaten Grobogan.
9. Tertatanya Makam Kyai Ganjur Desa Ngroto Kecamatan Gubug dan Tempat Parkir Taman Makam Pahlawan.
10. Terlaksananya Pengecatan kanstin, list trotoar, pohon turus jalan dan tiang PJU.
11. Terlaksananya Uji Mutu Kualitas Lingkungan Hidup Pengawasan, Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Pengawasan dan pengendalian dampak Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran Sungai dan Gerakan Cinta Lingkungan serta Konservasi Sumber Mata Air.
12. Terlaksananya Pembuatan IPAL Terminal Induk Purwodadi, Study Kelayakan Hayati Kabupaten Grobogan.
13. Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
14. Meningkatnya Produksi Bahan Baku Kayu Rakyat (P3B2KR).
15. Terpeliharanya Hutan Kota.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum, pada Tahun 2007 dialokasikan Rp. 112.193.238.500,- terserap Rp. 102.027.821.196,- (90,94%). Diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong percepatan perkembangan ekonomi, diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan pengairan, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Peningkatan jalan dan pembangunan jembatan.
2. Terlaksananya Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan, di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan, dengan total panjang 104 m, serta rehabilitasi Sayap dan Talud Jembatan di 6 lokasi.
4. Terbangunnya Talud Jembatan Ngolakan Dusun Sinawah Desa Kronggen dan Saluran Drainase / Gorong-gorong di 13 lokasi dengan total panjang 3.091,5 m'
5. Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 7.157 m', serta perbaikan saluran sekunder sepanjang 9.830 m'.
6. Terlaksananya Normalisasi saluran irigasi dan saluran pembuang di 6 lokasi sepanjang 8.667 m'.
7. Terlaksananya Perbaikan pintu air B.Gn.3 DI. Sidorejo di Kecamatan Toroh, sepanjang 245 m'
8. Terkurasnya lumpur syphon Kendalsari Desa Tajemsari, dan penanganan longsor bendung Dusun Grogol Desa Nambuhan, serta Perbaikan Cekdam Desa Tegalrejo
9. Terbangunnya 1 embung tipe B di Desa Sindurejo, dan 3 embung tipe C di Desa Crewek, Desa Sengonwetan dan Desa Pulokulon.

10. Terlaksananya Perbaikan Bendung Tahunan, Bendung Nambuhan, DAM Banjardowo dan Cross Drain DI Dumpil Kanan Dusun Pucang Kelurahan Grobogan, serta pengerukan Hulu Bendung Ngrumpeng Kecamatan Grobogan.
11. Terlaksananya Perbaikan longsoran Kali Kleben sepanjang 300 m', perbaikan Talud Kelurahan Kuripan sepanjang 135 m', serta Penanganan infrastruktur pengairan Kali Lusi sepanjang 1.000 m' dan 1 buah bangunan siphon.
12. Lancarnya Saluran jl. Gajah Mada, Saluran Nglejok dan Saluran Kuripan Kec. Purwodadi, avour Guyangan, sungai Glugu, Kali Selojari Taruman, Kali Ngantru, Kali Sente, Kali Jajar Baru, Kali Pucang, Kali Kliteh, Kali Putatsari dengan panjang keseluruhan 31.478 m.
13. Terbangunnya infrastruktur pedesaan dan perkotaan berupa sarana dan prasarana air bersih, pengembangan sistem instalasi pengolahan air (IPA) paket, dan 3 pasar desa, lingkungan, pavingisasi, trotoar, dan saluran.

5. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2007, dialokasikan Rp. 563.016.000,- terserap Rp. 500.574.900,- (88,91%), diarahkan untuk menuju terkendalinya penataan ruang sehingga pembangunan di Kabupaten Grobogan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Peninjauan Kembali RUTRK Purwodadi, dan Godong.
2. Tersusunnya RTR dan RPJM KTP2D Desa Jeketro Kecamatan Gubug.
3. Terlaksananya Penunjang WISMP (Water Irigation Sector Management Program).
4. Terlaksananya Safeguarding DAK, dan Safeguarding Dana Ad Hock.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2007, diarahkan pada upaya terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dialokasikan anggaran Rp. 4.761.316.250,- terserap Rp.4.630.806.653,- (97,26%), dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Grobogan TA 2008, Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Grobogan TA 2007, Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA 2007, Kebijakan Umum APBD Kab. Grobogan TA. 2008 dan Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kab. Grobogan TA 2008, dokumen APBD Belanja Langsung, Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran SPP, SPM dan Pengelolaan Anggaran SPJ, Pemberdayaan Perempuan, Profil Daerah, LKPJ Tahun 2006, LPPD Tahun 2006, Data base Sarpras Pendidikan dan Kesehatan, rencana Program Penanggulangan kemiskinan Jangka Menengah (Pronangkis), Review Desain Jaringan Pipa PDAM, Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Pasar Beras di Nglejok Kec. Purwodadi dan Kinerja dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan, Detail Engineering Design (DED) Pasar Agro Hortikultura Kota Purwodadi, DED Revitalisasi Alun-Alun

Purwodadi, dan DED Pembangunan Jalan Godong - Truko Ruas 16, Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Studi Jalan Lingkar Timur Purwodadi.

2. Terlaksananya Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D) Kabupaten Grobogan.
3. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2007 (BU Perencanaan) dan pengembangan Forum For Economic Development and Employment (FEDEP) Kabupaten Grobogan (Bantuan Provinsi 2007)
4. Penunangan RIA (Regulatory Impact Assessment / Telaah Dampak Regulasi)
5. Pendampingan Koordinasi Pengembangan Forum for Economic Development and Employment (FEDEP) Kab. Grobogan,
6. Terlaksananya Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bidang Ekonomi
7. Terlaksananya Penunangan TKK (Tim Koordinasi Kabupaten) Program Pamsimas (Pembangunan Air Minum Berbasis Masyarakat), P2KP dan PKPS-BBM.
8. Terlaksananya Pelatihan PLA dan Rencana Aksi Masyarakat (Replika Program UNICEF) dalam Penanggulangan Flu Burung.

7. Urusan Perumahan

Penyelenggaran Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2007, diarahkan pada upaya tertatanya lingkungan pemukiman yang memenuhi derajat kesehatan, dialokasikan anggaran Rp. 335.000.000,- terserap Rp. 330.400.000,- (98,63%), dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Terpugarnya perumahan dan lingkungan.
2. Tertatanya pemukiman penduduk.
3. Tersedianya fasilitas sarana air bersih.

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2007 dengan dialokasikan Rp. 370.000.000,- terserap Rp. 369.400.000,- (99,84%), diarahkan pada penumbuhan semangat bela negara, cinta tanah air dan mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat bagi generasi muda, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Pembinaan SDM Pemuda Pelajar dan Cabang Olah Raga Prestasi di Daerah.
2. Terlaksananya Penunjang Pembinaan Olah Raga.
3. Tersedianya sarana prasarana olah raga yang berkembang di masyarakat

9. Urusan Penanaman Modal

Pada Urusan Penanaman Modal dialokasikan anggaran Rp. 336.350.000,- terserap Rp. 323.412.300,- (96,15%), diarahkan pada meningkatnya kegiatan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terselenggaranya kegiatan promosi potensi investasi dan produk unggulan.
2. Terlaksananya mengikuti Expo 2007.

3. Terlaksananya pembinaan manajemen bagi sentra/kelompok UKM dan temu usaha antar YKM.
4. Tersalurnya perkuatan modal bagi swasta /kelompok usaha kecil mikro.

10. Urusan Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM dialokasikan Rp. 763.096.500,- terserap Rp. 717.902.193,- (94,08%), diarahkan pada upaya terwujudnya lembaga koperasi yang sehat dan mandiri, yang mampu menjadi soko guru ekonomi, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Tersalurnya bantuan modal usaha pada KSP/USP, KUD bantuan modal pupuk pada lembaga koperasi.
2. Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi SP/USP, klasifikasi dan pengawasan koperasi.
3. Tersedianya dokumen hak atas tanah UKM.
4. Meningkatnya ketrampilan pengelolaan dan pengawasan koperasi.
5. Bertumbuh dan berkembangnya lembaga koperasi baru.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, diarahkan pada meningkatnya kualitas layanan Administrasi Kependudukan. Pada Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 2.967.596.000,- terserap Rp. 2.790.905.127,- (94,05%), dengan kegiatan hasil antara lain :

1. Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan.
2. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.
3. Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan
4. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (Akta Kelahiran).
5. Terlaksananya Pengadaan Sarana Pelayanan Akta dan Sarana Pencatatan Perkawinan, Formulir Pencatatan Sipil dan Peralatan SIAK on line.
6. Terselenggaranya Administrasi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
7. Tersusunnya Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Pilgub 2008 (Bantuan Provinsi 2007).

12. Urusan Ketenagakerjaan

Pada Urusan Ketenagakerjaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.277.655.000,- terserap sebesar Rp. 1.246.890.164,- (97,59%), diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, penyebaran informasi bursa kerja, dan pemahaman hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha , dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Tersedianya peralatan untuk pendidikan dan ketrampilan calon tenaga kerja.
2. Meningkatnya ketrampilan pencari kerja pada bidang otomotif, komputer dan menjahit.
3. Tersebarannya informasi bursa kerja.
4. Terpantaunya kinerja lembaga cabang PPTKIS

5. Meningkatnya kinerja lembaga Dewan Pengusaha Tripartit dan pengelolaan K3.
6. Meningkatnya pemahaman norma ketenagakerjaan dan hubungan industrial bagi pekeja dan pengusaha.

13. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan dialokasikan anggaran Rp. 1.451.000.000,- terserap sebesar Rp. 1.446.147.500,- (99,67%), diarahkan pada upaya meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Tersalurnya dana pembiayaan pembelian gabah pada 6 kelompok masyarakat, 500 batang bibit sukun, 2.000 batang bibit melinjo, 10 ton beras dan 32 unit pengolahan hasil pertanian pada 8 kelompok di 4 desa/kecamatan daerah rawan pangan, bantuan/penguatan modal pengembangan pada 7 lumbung pangan desa, etalase makanan pada 20 warung di SD dan bantuan benih padi dan jagung di 19 kecamatan.
2. Meningkatnya kemampuan 7 kelompok pengelola lumbung desa dan 20 orang pengelola warung SD.
3. Terlaksananya Rakor Evaluasi Temu Karya Dewan Ketahanan Pangan dan kaji terap kebijakan ketahanan pangan.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2007, dialokasikan anggaran Rp. 1.136.250.000,- terserap Rp. 1.105.420.000,- (97,29%), diarahkan pada meningkatnya kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun di luar KDRT, serta pemberdayaan perempuan dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Berkembangnya Sistem Informasi Gender dan Anak.
2. Terlaksananya Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004 dan Lembaga Pelayanan Swatantra.
3. Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi Tim Focal Point PUG dan Gerakan Sayang Ibu (GSI).
4. Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Perempuan Kab. Grobogan.
5. Meningkatnya kinerja Lembaga yang berbasis Gender dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
6. Terlaksananya Kaji Terap Pengarusutamaan Gender dan Teknik Analisis Gender bagi para Pimpinan.
7. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Pemantapan Realisasi KKJ.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Usuran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 487.000.000,- terserap Rp. 486.898.350,- (99,98%), diarahkan pada upaya terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Tersedianya alat kontrasepsi dan sarana mobilitas KB keliling.
2. Terselenggaranya pelayanan KIE, Advokasi KB medis operasi, pusat pelayanan informasi dan konsling KRR serta BKB Posyandu.
3. Terlaksananya pembinaan akseptor KB, penanggulangan bahaya narkoba, PMS, dan Bina Keluarga kelompok UPPKS.

16. Urusan Perhubungan

Usuran Perhubungan pada Tahun Anggaran 2007, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.386.046.220,- terserap Rp. 2.263.033.340,- (94,84%), diarahkan pada meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta lancarnya arus lalu lintas, dengan hasil kegiatan diantaranya :

1. Tersedianya dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kabupaten Grobogan.
2. Tersedianya Kertas Uji Kendaraan bermotor.
3. Representatifnya landasan, Kios , Mushola dan Pavingisasi di lingkungan sekitar Mushola Terminal Purwodadi dan Sub Terminal Angkotdes Purwodadi.
4. Meningkatnya pemahaman disiplin berlalulintas bagi siswa / pelajar.
5. Terpilihnya awak kendaraan umum teladan tingkat Kabupaten.
6. Terselenggaranya pelatihan bagi petugas lalu lintas di lingkungan DISHUBPAR.
7. Terlaksananya Perbaikan Pos TPR dispensasi jalan dan pengecatan marka jalan pengamanan lalu lintas.
8. Terpasangnya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Traffic Light 1 unit dan Warning Light 4 unit, Traffic Corn serta lampu sirine kendaraan patroli.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Usuran Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 930.295.000,- terserap Rp. 697.782.500,- (75,01%), diarahkan pada meningkatnya kelancaran komunikasi dan informasi secara timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Meningkatnya sumber daya komunikasi dan informasi serta tenaga Protokol.
2. Terbitnya Majalah Gema Bersemi.
3. Lancarnya kegiatan BAKOHUMAS.
4. Terlaksananya penyebaran Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APBD Kabupaten Grobogan TA. 2007 dan Perhitungan APBD Kab. Grobogan TA. 2006 dan Sosialisasi LKM.
5. Tersedianya bahan siaran TV dan CD Potensi Wisata.
6. Meningkatnya kualitas siaran RSPD/Purwodadi FM.

18. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 1.279.345.000,- terserap Rp. 1.179.571.040,- (92,20%), diarahkan pada upaya membantu adanya jaminan dan kepastian hukum atas hak perdata kepemilikan asset tanah, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Bersertifikatnya 30 bidang Tanah Aset Pem Kab Eks. Bondo Desa/Kel, dan 200 bidang Tanah di Desa Wates Kec. Kedungjati dan Desa Gaji Kec. Tegowanu melalui Prona Daerah.
2. Terlaksananya Pengadaan Tanah Kas Desa, sebanyak 2 bidang di desa Deras dan Tanggunharjo dan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sirkuit Croos Permanen, 2 bidang 5320 m² dan 5494 m².
3. Terlaksananya Penunjang Bantuan Sertifikasi Pengukuran dan Pemetaan, Rehab Kantor Pertanahan dan Plotter.
4. Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan, pada 19 desa di 19 Kecamatan.
5. Terlaksananya pembinaan Camat dan PPAT se Kabupaten.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007, dialokasikan anggaran Rp. 2.954.246.000,- terserap Rp. 2.835.558.950,- (95,98%), diarahkan pada terciptanya kondisi masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI dan kestabilan politik yang mantap, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah.
2. Terlaksananya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan pemilik/pengelola Hotel, Kafe, Restoran dan Swalayan, Operasi Yustisi, Lalu Lintas Terpadu, Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah Bagi Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta penghayatan kepercayaan, Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja, Administrasi Kehansipan, dan BAKOPPAR.
3. Terlaksananya Pengamanan Kompetisi PSSI 2007, Hari-hari Besar Daerah dan Nasional, Pilkadaes.
4. Terlaksananya Penataan/ pengaturan Pasar Pagi Purwodadi.
5. Tersedianya sarana Aduan Masyarakat, dan Bahan Bantuan Bencana Alam
6. Terselenggaranya Forum Komunikasi Ketentraman dan Ketertiban Terpadu bagi Muspika se Kabupaten Grobogan, Orientasi Wawasan Kebangsaan bagi Tomas, Toga dan Toda Se Kab.Grobogan, dan Orientasi Ketahanan Bangsa bagi Pemuda dan Pelajar se Kab. Grobogan, Sarasehan Lintas Parpol, LSM, Tomas, dan Toga di Kecamatan Se Kabupaten Grobogan.
7. Terlaksananya Sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat bagi Camat, Tomas, Toga dan Toda se Kab. Grobogan serta informasi Potensi Bencana Alam.
8. Meningkatnya ketrampilan PAM SWA KARSA., Matrik Hansip/Linmas, TON Inti Hansip / Linmas Kecamatan, Managemen PBP, Mitigasi Bencana dan SAR,

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi Tomas Toga, Toda Tk.Kec. Se Kab. Grob.

9. Terselenggaranya Rakor Terpadu Penanganan Bencana dan Gladi lapang Satlinmas, dan Piket PBA.
10. Terbangunnya Garasi Mobil Damkar.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Tahun Anggaran 2007, dialokasikan anggaran Rp. 94.242.548.407,- terserap Rp. 80.221.945.711,- (85,12%), diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Tersusunya dokumen Perda, Peraturan Bupati dan Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain serta dokumen LKPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2007 dan penyusunan Naskah Akademis Barang Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya sebanyak 2 buku, 80 buku Standarisasi Sarana Prasarana Perkantoran dan 100 buku Pedoman Standarisasi Indeks Biaya serta 2 SPM Dinas Kesehatan dan Dinas P dan K.
2. Terlaksananya Sosialisasi peraturan Perundang-undangan dan Semiloka Raperda dan Bintek Analisis Jabatan, Penetapan Kinerja Instansi/Unit Kerja, dan Penyusunan APBDes untuk perangkat desa.
3. Terselenggaranya Pengukuhan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Grobogan Tahun 2004 – 2009 sebanyak 250 orang.
4. Diterapkannya Sistem Pengelolaan Keuangan dan aplikasi pembuatan kartu gaji perorangan, dan Komputerisasi Sistem Informasi Barang Dasar sebanyak 1.238 record.
5. Tersalurinya bantuan DAD/K kepada 280 desa/kelurahan dan dana bantuan kegiatan TMMD Mandiri sebanyak 1 paket.
6. Terlaksananya Pelacakan dan Penetapan Batas Daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2007 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.814.963.880,- terserap Rp. 8.773.394.989,- (99,52%), diarahkan pada upaya memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guna mengurangi jumlah penduduk miskin, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penilaian desa, program P2KP dan kegiatan PPK.

2. Meningkatnya kemampuan masyarakat akan teknologi tepat guna, kesetaraan gender, dan kemampuan aparatur pemerintahan desa, LPMD, P3MD, BKD dan pengelola lumbung desa.
3. Tersalurnya bantuan stimulan pemerintahan desa, TMMD Mandiri, dan PMTAS.
4. Terisinya lowongan kepala desa dan terbentuknya BPD.
5. Tersedianya data profil desa/kelurahan.

22. Urusan Sosial

Urusan Sosial pada Tahun 2007 dialokasikan anggaran Rp. 1.686.068.500,- terserap Rp. 1.670.165.114,- (99,06%), diarahkan pada upaya meningkatnya kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah sosial, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Berkurangnya jumlah fakir miskin, WTS, dan PGOT.
2. Meningkatnya ketrampilan berusaha keluarga miskin, Penca, anak terlantar dan penyandang sosial lainnya.
3. Meningkatnya kesiapan penanggulangan bencana.
4. Terpeliharanya sarana prasarana dan terpenuhinya kebutuhan dasar panti asuhan dan panti jompo.
5. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat.

23. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan, diarahkan pada upaya meningkatnya ketahanan budaya masyarakat dari pengaruh budaya asing. Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 160.000.000,- terserap Rp. 160.000.000,- (100%), dengan hasil kegiatan :

1. Terpeliharanya Museum dan Kesenian Tradisional Daerah.
2. Meningkatnya apresiasi masyarakat atas cagar budaya dan kesenian daerah.

24. Urusan Statistik

Urusan Statistik, diarahkan pada upaya ketersediaan data pembangunan yang up to date, valid dan akuntabel yang diperlukan dalam perencanaan. Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 188.000.000,- terserap Rp. 188.000.000,- (100%), dengan kegiatan Penyusunan Data Statistik Kabupaten Grobogan Tahun 2007, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya dokumen statistik, PDRB, IGR, IHGB, Ketenagakerjaan, DPA dan Kabupaten/Kecamatan dalam angka.

25. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan, diarahkan pada terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 2.147.926.500,- terserap Rp. 985.824.415,- (45,90%), dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terawatnya Jaringan Wireless LAN.
2. Terupdate nya data SIM Gaji dan Perawatan Software.
3. Tersusunnya SIMDA.

4. Meningkatnya kemampuan pengelola Kearsipan Pemerintah Daerah.

26. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan, diarahkan pada upaya penumbuhan minat baca masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat madani, berwawasan maju, dan mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Tahun Anggaran 2007 dialokasikan anggaran Rp. 255.000.000,- terserap Rp. 252.748.000,- (99,12%), dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Bertambahnya Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Kabupaten Grobogan, perpustakaan mobil keliling dan perpustakaan sekolah/masyarakat
2. Terlaksananya Pengembangan klient Perpustakaan.
3. Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola perpustakaan sekolah/desa.
4. Bertambahnya peralatan penunjang perpustakaan.

B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Perikanan dialokasikan anggaran Rp. 768.063.000,- terserap Rp. 732.012.400,- (95,31%), diarahkan untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar serta optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani ikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Bertambahnya benih ikan di perairan umum.
2. Meningkatnya kemampuan budidaya ikan air tawar .
- 3 . Meningkatnya sarana /prasarana BBI Karangrayung.

2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian yang dialokasikan anggaran Rp. 10.000.618.450,- terserap Rp. 9.679.192.502,- (96,79%), diarahkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, melalui pengembangan komoditas berwawasan agribisnis, dan budidaya peternakan dengan teknologi tepat guna, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen pengembangan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan, statistik dan informasi pertanian.
2. Bertambahnya sarana/ parasarana teknologi pertanian/perkebunan, laboratorium/ klinik tanaman dan teknologi tepat guna peternakan.
3. Terlaksananya aplikasi teknologi penggunaan pupuk alternatif, budidaya usaha peternakan, pembibitan sapi brahman cross dan penyaluran bibit ternak.
4. Meningkatnya pengetahuan petani tentang agribisnis pertanian dan peternakan.
5. Terlaksananya peremajaan tanaman kelapa, jarak, pengendalian hama tanaman pangan dan kelapa.
6. Terbangunnya embung mini, dan sumur gali sawah.
7. Terkendalinya penyakit menular ternak dan flu burung.

3. Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan dialokasikan anggaran Rp. 1.347.306.000,- terserap Rp. 1.314.395.040,- (97,56%), diarahkan pada upaya penanggulangan lahan kritis dan konservasi tanah dalam rangka menjaga keseimbangan alam, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya GNRHL, PHBM, pengembangan tanaman jarak dan hutan produksi pangan.
2. Bertambahnya demplot penyelamatan dan pemanfaatan sumber mata air.
3. Terwujudnya pilot projek desa mandiri energi.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dialokasikan anggaran Rp. 921.000.000,- terserap Rp. 907.234.550,- (98,51%), diarahkan pada upaya pengembangan energi alternatif dan pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Terpasangnya KWH meter pada PJU Kota Purwodadi.
2. Terkendalinya pemasangan titik lampu PJU dan pertambangan rakyat.
3. Tersedianya dokumen pengaturan penambangan bahan galian C.
4. Terdatanya produksi hasil pertambangan.
5. Terlaksananya sosialisasi program desa mandiri energi.

5. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dialokasikan anggaran Rp. 641.650.000,- terserap Rp. 619.379.550,- (96,53%), diarahkan pada upaya pengembangan potensi pariwisata , dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Tersedianya bahan promosi berupa audio visual obyek-obyek wisata.
2. Terlaksananya pemilihan duta wisata
3. Terbinanya kelompok seni budaya.
4. Semakin dikenalnya obyek wisata oleh wisatawan nusantara/manca negara.
5. Bertambahnya kelengkapan penunjang di obyek wisata Goa Lawa, dan Gowa Macan.

6. Urusan Industri

Urusan Industri dialokasikan anggaran Rp. 1.148.738.000,- terserap Rp. 1.124.936.250,- (97,93%), diarahkan pada berkembangnya usaha industri kecil maupun menengah dalam rangka menggairahkan kegiatan ekonomi mikro, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Semakin lancarnya kegiatan modal ventura bagi industri berbasis teknologi.
2. Terbagunnya pabrik pengolahan minyak jarak.
3. Terbinanya industri kecil maupun menengah.
4. Meningkatkan pengetahuan dunia usaha atas teknologi industri.

7. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dialokasikan anggaran Rp 15.152.495.813,- terserap Rp. 13.100.715.535,- (86,46%), diarahkan pada upaya menggairahkan perdagangan sektor riil dan perlindungan konsumen, serta pengawasan peredaran barang dan jasa, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Terselesainya pengaduan konsumen.
2. Semakin efektifnya pengawasan peredaran barang /jasa.
3. Lancarnya distribusi BBM
4. Semakin dikenalnya hasil industri oleh masyarakat luar.
5. Semakin representatifnya pasar daerah, dan pasar hewan yang ada.
6. Bertambahnya jumlah alat pengaman bahaya kebakaran di pasar-pasar daerah.

8. Urusan Ketrasmigrasian

Urusan Ketrasmigrasian dialokasikan anggaran Rp. 1.366.270.500,- terserap Rp. 827.977.500,- (60,60%), diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan hasil kegiatan antara lain :

1. Terbagunnya kerjasama dengan daerah tujuan/penerima transmigran.
2. Meningkatnya pengetahuan/ketrampilan calon transmigran.
3. Lancarnya pengiriman transmigran ke lokasi daerah tujuan/penerima.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerima beberapa Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

A. Tugas Pembantuan yang diterima

Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah meliputi Urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenagakerjaan, dan Pertanian dengan anggaran Rp. 36.189.737.000,- terserap Rp. 30.725.448.000,- (84,90%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

- 1) **Urusan Kesehatan**, menerima anggaran dari Departemen Kesehatan RI sebesar Rp. 6.000.000.000,- terserap Rp. 5.870.601.000,- (97,84%), yang digunakan untuk pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana rujukan pada RSUD Dr. R. SOEDJATI.
- 2) **Urusan Pekerjaan Umum**, menerima anggaran dari Departemen Pekerjaan Umum RI sebesar Rp. 3.567.370.000,- terserap Rp. 3.239.840.000,- (90,81%) digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, penyediaan air irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan irigasi.

- 3) **Urusan Ketenagakerjaan**, menerima anggaran dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebesar Rp. 350.000.000,- terserap Rp. 347.590.000,- (99,31%), digunakan untuk perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui pengembangan kewirausahaan dan padat karya produktif.
- 4) **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**, menerima anggaran dari Departemen Dalam Negeri RI sebesar Rp. 6.600.000.000,- terserap 100% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan PPK di 7 (tujuh) Kecamatan. Disamping itu, Kabupaten Grobogan juga menerima anggaran dari Departemen Pekerjaan Umum RI sebesar Rp. 6.350.000.000,- terserap 100% dengan kegiatan P2KP di 17 Desa/Kelurahan Kecamatan Purwodadi.
- 5) **Urusan Pertanian**, menerima anggaran dari Departemen Pertanian RI sebesar Rp. 19.672.376.000,- terserap Rp. 14.667.417.000,- (74,55%), digunakan antara lain untuk pemberian bantuan benih, pembuatan dan perbaikan Embung, pembangunan Sumur Resapan, pengembangan Agro Industri Pedesaan berbasis tanaman pangan, pengembangan pupuk organik, peningkatan produksi dan produktivitas padi serta polowijo.

2. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi Urusan Ketenagakerjaan, Pertanian serta Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial dengan jumlah anggaran Rp. 1.408.250.000,- terserap Rp. 1.408.250.000,- (100%) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Urusan Ketenagakerjaan**, menerima anggaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Rp. 68.000.000,- terserap 68.000.000,- (100%), digunakan untuk Pelatihan Kewirausahaan berupa Pelatihan Keterampilan Menjahit dan Otomotif.
- 2) **Urusan Pertanian**, menerima anggaran dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah Rp. 1.191.250.000,- terserap Rp. 1.191.250.000,- (100%), digunakan untuk peningkatan produksi sapi potong dan pengembangan ternak sapi melalui Program *Village Breeding Center*.
- 3) **Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial**, menerima anggaran dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Rp. 149.000.000,- terserap Rp. 149.000.000,- (100%), digunakan antara lain untuk : pembinaan dan pelayanan KB, penyuluhan bahaya Narkoba, penyakit menular seksual HIV AIDS dan pemberdayaan keluarga.

Jumlah keseluruhan anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2007, baik yang diterima dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi adalah Rp. 43.947.987.000,- meningkat 279,83% bila dibandingkan anggaran yang diterima Tahun 2006 Rp. 11.570.370.000,-. Kenaikan tersebut merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang semakin efektif.

B. Tugas Pembantuan Yang diberikan.

Pada Tahun 2007 di Kabupaten Grobogan tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak, berupa kegiatan Penegasan Batas Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pemetaan pembangunan maupun pengembangan wilayah.

Disamping melakukan Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga melakukan kerjasama dengan daerah lain, melalui Forum Kedungsepur dan Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI).

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga.

Kerjasama dengan PT. Petracho Sukma Mandiri (Lembaga Swasta di Purwodadi) dalam rangka pengadaan Perumahan RSH bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan senantiasa membangun hubungan sinergis dengan seluruh jajaran Instansi Vertikal, dengan azas kesetaraan dan saling menghormati guna menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya maupun keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Forum Kemuspidaan, Sosialisasi Bidang Hukum, penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Kerukunan Umat Beragama, serta pensertifikatan tanah massal melalui Proda.

D. Pembinaan Batas Wilayah.

Secara demografi Kabupaten Grobogan berada di tengah 8 (delapan) Kabupaten tetangga. Di sebelah Barat dengan Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah Utara dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah Timur dengan Kabupaten Blora dan di sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen dan Ngawi (Provinsi Jawa Timur). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan penegasan Batas Wilayah dengan Kabupaten Demak. Sampai saat ini telah mempunyai 4 (empat) Penegasan Batas Wilayah Administratif, yaitu dengan Kabupaten Blora, Pati, Semarang dan Demak. Sedangkan yang belum dilaksanakan adalah dengan Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Kudus.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Grobogan termasuk daerah yang rawan bencana, diantaranya : Banjir di daerah bantaran sungai Lusi, Serang, Tuntang, KB 1 dan KB 15 di Kecamatan Tegowanu; Angin Taufan yang lokasinya hampir menyeluruh; Tanah Longsor di Kecamatan Grobogan, Tawangharjo dan Wirosari; dan Kekeringan pada musim kemarau melanda di belahan wilayah timur.

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana, upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Dalam mengatasi kekeringan, dengan melaksanakan gerakan penghijauan/reboisasi pembangunan/perbaikan embung, sumur resapan dan dropping air bersih pada musim kemarau.
2. Dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir, dengan melaksanakan pembangunan/perbaikan tanggul, drainase dan normalisasi sungai, serta melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pemali dan Seluna, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, selaku pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangannya, piket siaga banjir baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di desa/kelurahan rawan banjir dan penyaluran bantuan terhadap korban/musibah dan menyiapkan lokasi pengungsian.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus.

Di Kabupaten Grobogan tidak terdapat kawasan khusus. Sementara yang ada adalah kawasan lindung sebagaimana diatur di dalam Perda No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW), yang meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya terdiri kawasan yang mempunyai kelerengan diatas 40° seluas $\pm 448,50$ Ha di Kecamatan Grobogan, Brati, Tawangharjo dan Wirosari dan kawasan resapan air yang berada di 30 Desa pada 11 Kecamatan.
2. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan sungai seluas ± 7.265 Ha, sempadan waduk seluas 149 Ha dan sempadan mata air seluas ± 1.382 Ha.
3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya seluas $\pm 206,43$ Ha yang meliputi kawasan Bledug Kuwu, Mrapen, Makam Ki Ageng Selo, Makam Ki Ageng Tarub, Goa Lawa dan Goa Macan serta Goa Urang.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, telah melaksanakan koordinasi yang efektif dengan jajaran aparat keamanan. Pada Tahun 2007 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di 235 desa dan Pembentukan BPD di 273 desa yang telah berjalan dengan lancar, tertib, aman dan sukses tanpa adanya ekses negatif yang ditimbulkan.

H. Hal lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2007, sebagai berikut :

1. Juara I Tingkat Nasional dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL);
2. Juara I Tingkat Nasional, Kelompok Tani Sumber Jati Makmur Desa Tegalrejo Kecamatan Wirosari dalam hal kinerja kelompok GNRHL.
3. Juara I Tingkat Nasional dalam Agro Bisnis Kedelai, atas nama Kelompok Tani Kabul Lestari Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon.

4. Juara I Tingkat Nasional dalam lomba Bibit Sapi hasil Inseminasi Buatan (IB) Jantan atas nama Kelompok Tani Ternak Desa Kradenan Kecamatan Kradenan, dan Juara II Tingkat Nasional dalam Lomba Bibit Sapi hasil IB Betina atas nama Kelompok Tani Desa Mojorebo Kecamatan Wirosari;
5. Juara I Tingkat Nasional cabang olah raga Karate dan Bola Volly pada POSPENAS (Pekan Olah Raga Pondok Pesantren Nasional) Tahun 2007;
6. Juara Harapan I Tingkat Nasional dalam Apresiasi Kesenian Tradisional Daerah di Ujung Pandang/Makasar; dan masih banyak lagi prestasi/penghargaan di tingkat regional.

PENUTUP

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, secara jujur harus diakui, bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2007 masih terdapat adanya program/ kegiatan yang hasilnya belum memuaskan, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan koreksi/perbaikan.

Sedangkan mengenai keberhasilan yang telah kita capai, kesemuanya itu merupakan hasil kerja keras kolektif dari jajaran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya atas segala kekurangan kami mohon maaf, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir bathin kepada kita untuk terus meningkatkan semangat juang membangun Kabupaten Grobogan agar semakin maju, makmur, mandiri dan sejahtera sehingga mampu menapak hari esok yang lebih baik, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwodadi, Maret 2008.

BUPATI GROBOGAN

H. BAMBANG PUDJIONO, SH

